



# RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN

Tahun 2026





# RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026



**SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN  
KOTA PEKALONGAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diktum keenam huruf b, penyusunan Renja Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029. Dokumen Renja juga telah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025- 2029. Dokumen Renja ini merumuskan secara rinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekalongan pada Tahun 2026. Setiap kegiatan disertai dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai secara optimal.

Pekalongan, 23 Juli 2025  
Kepala Sekretariat DPRD Kota  
Pekalongan  
  
**WIDARJANTO SH.M.Hum**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196604241996031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	32
3.3 Program dan Kegiatan .....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	44
BAB V PENUTUP .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023.....	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2024 Target Dan Proyeksi Tahun 2025 dan Tahun 2026 .....	25
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan.....	23
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 .....	31
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 .....	36
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 .....	44



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir dan
6. Penetapan.

Rancangan awal Renja Perangkat disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan dari rancangan awal Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Setelah dilakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah maka akan disempurnakan menjadi Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada

tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun n.
- b. Selanjutnya rancangan awal renja disempurnakan berdasarkan surat edaran Wali Kota Pekalongan menjadi rancangan renja. Rancangan renja dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah dan sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
- c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Wali Kota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Wali Kota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Renja Perangkat Daerah.

---

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan;
17. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026

---

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

#### 1. Maksud

Dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Tujuan

Dokumen Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah.;
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Pekalongan terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antar perencanaan, penganggaran antar bagian yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

---

## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD , agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Sekretariat DPRD , Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

#### 1.2 Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

#### 1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Sekretariat DPRD Kota Pekalongan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selaian itu, juga untuk

dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

#### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD .

#### 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

---

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD untuk periode tahun berjalan, yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja dan target capaian tahunan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menjadi instrumen pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun ketidaktercapaian pelaksanaan misi organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun sebagai dasar pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, sekaligus sebagai proyeksi capaian target indikator kinerja pada tahun 2027.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebesar Rp. 68.011.287.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.025.695.772,- atau 91,20%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 61.530.977.000, - melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 2 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh SKPD Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tata kelola

1. Pendapatan  
Nihil

2. Belanja

Tidak ada kendala yang terlalu berarti, dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.



**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024  
KOTA PEKALONGAN**

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
						Target 2024	Persentase Realisasi Tahun 2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
5	URUSAN PENUNJANG									
4.02	SEKRETARIAT DPRD									
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan ketercapaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Yang Disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 dokumen	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan Yang Disusun	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	8 dokumen	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100%			Belum Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
						Target 2024	Persentase Realisasi Tahun 2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.02.001	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	4 dokumen	80	Belum Tercapai
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	15 kali	3 kali	1 kali	1 kali	100%	6 kali	40	Belum Tercapai
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda-benda pos	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	15 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100%	20 unit	133	Tercapai

4.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	55 bl	11 bulan	11 bl	11 bl	100%	44 bl	80	Belum Tercapai
4.01.01.2.06.05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.02.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 bln	12 bulan	12 bln	12 bln	100%	48 bln	80	Belum tercapai
4.01.01.2.06.09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	450 kali	130 kali	348 org/kali	450 org/kali	100%	757 kali	219	Tercapai
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase ketercapaian penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.01.01.2.08.001	Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	75 unit	17 unit	15 unit	14 unit	107%	58 unit	77	Belum Tercapai
		Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	-	12 bl	12 bl	12 bl	100%	100%	100%	Tercapai

4.02.01.2.09.009	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2	2 unit	100 %	100 %	100 %	Tercapai
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60 bl	12 bulan	12 bl	12 bl	100%	48 bl	80	Belum Tercapai
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Presentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.15.001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	<b>100%</b>	35 orang	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.15.002	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	<b>100%</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	<b>100%</b>	12 paket	12 paket	12 paket	100 %	48 paket	90	Belum tercapai
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		12 laporan						

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
						Target 2024	Persentase Realisasi Tahun 2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
4.02.02.2.01	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 dokumen	16 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100%	16 dokumen	80	Belum Tercapai
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan kajian perundangan undangan	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%	100%	100	Tercapai
4.02.02..2.02	Pembahasan kebijaksanaan anggaran	Presentase penambahan kebijakan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	Tercapai
4.02.02.2.2.0001	Pembahasan KUA PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA PPAS	100%	100%	100%	2	100%	100%	100	Tercapai
4.02.02.2.2.0003	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	100%	100%	100%	2	100%	100%	100	Tercapai



Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
						Target 2024	Persentase Realisasi Tahun 2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02.2.2.0006	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	-		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100	Tercapai
<b>4.02.02..2.04</b>	<b>Peningkatan kapasitas DPRD</b>	Presentase ketercapaian peningkatan kapasitas DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	80	Belum Tercapai
4.02.02.2.04..0001	Orientase DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokuemn	1 dokumen	1 dokumen-	1 dokumen	20	Belum Tercapai
4.02.02.2.04..0002	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	5 dokumen	1 dokumen	4 dokuemn	-4 dokuemn	100 %	1 dokumen	20	Belum Tercapai
4.02.02.2.04..0006	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	5 dokumen	1 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	4 dokumen	80	Belum Tercapai
4.02.02.2.04..0007	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	-	-	1 dokumen	1 dokuemn	100%-			Tercapai
4.02.02.2.04..0008	Publikasi dan dokumentasi DPRD	Jumlah dokumentasi publikasi dan dokumentasi DPRD	-	-	18 dokumen	48 dokumen	150%	4 dokumen	80	Belum Tercapai
<b>4.02.02..2.05</b>	<b>Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat</b>	Prosentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	80	Belum Tercapai

Kode	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2024	Persentase capaian target RPJMD (%)	Status Capaian
						Target 2024	Persentase Realisasi Tahun 2024			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.02..2.05.0001	Kunjungan kerja dalamn daerah	Laporan jumlah hasil kunjungan kerja DPRD	5 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokueman	100 %	1 dokumen	20	Belum Tercapai
4.02.02..2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	100%		100%	2 dokumen	100%	100%	100	Tercapai
4.02.02..2.08	Fasilitasi tugas DPRD	Presentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	100%	100%	00%	100%	100%	100%	100%	100%
4.02.02..2.08.0001	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	-		12 dokumen	12 dokuemen	-	1 dokumen		Tercapai

---

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.**

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

### **1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan adalah:

#### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kepala Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan dan pengoordinasian penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi dan bidang penganggaran dan pengawasan.

Merujuk pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2021, Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan dan pengoordinasian penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang legislasi dan bidang penganggaran maupun pengawasan.

Adapun fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang sekretariat DPRD;
- b. Perumusan kebijakan bidang sekretariat DPRD;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan program serta keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;
- f. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- g. pengarahannya pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

#### **Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Wali Kota

Pekalongan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut:

- b. Sekretaris DPRD
- c. Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
- d. Kabag Umum dan Keuangan
  - 1) Subbagian Umum
  - 2) Subbagian Program Keuangan
- e. Kabag persidangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki SDM sejumlah 75 orang yang terdiri dari 22 orang ASN dan 53 Non ASN. Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kota Pekalongan berdasarkan golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut.

- a. Jumlah pegawai ASN Sekretariat DPRD berdasarkan golongan / pangkat adalah sebagai berikut:

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1) Golongan IV  | : 4 orang  |
| 2) Golongan III | : 10 orang |
| 3) Golongan II  | : 7 orang  |
| 4) PPPK Gol IX  | : 1 orang  |

- b. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| a) Pasca Sarjana | : 3 orang |
| b) Sarjana       | : 8 orang |
| c) D IV / D III  | : 4 orang |
| d) SMA Sederajat | : 5 orang |
| e) SMP Sederajat | : 1 orang |

## 3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah :

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Bangunan gedung kantor permanen ( kantor setwan ) | : 1 unit  |
| b. Gedung garasi                                     | : 1 unit  |
| c. Gedung rumah Jabatan                              | : 1 unit  |
| d. Genset rumah dinas                                | : 1 unit  |
| e. Genset kantor setwan                              | : 1 unit  |
| f. Station wagon                                     | : 11 unit |
| g. Micro bus   | : 1 unit  |

h. Sepeda Motor	: 1 unit
i. Rak rak penyimpanan	: 6 unit
j. Lemari penyimpan	: 6 unit
k. Mesin penghitung uang	: 1 unit
l. Mesin Fotokopi	: 1 unit
m. Lemari Besi metal	: 4 unit
n. Lemari kayu	: 10 unit
o. Rak kayu	: 4 unit
p. Filing kabinet	: 8 unit
q. Peti Uang	: 1 unit
r. Lemari sorok	: 1 unit
s. Lemari kaca	: 1 unit
t. CCTV	: 12 unit
u. Papan visual	: 2 unit
v. White board	: 8 buah
w. Camera digital	: 1 buah
x. Display ruang paripurna	: 2 unit
y. Alat perekam suara	: 3 unit
z. Kursi besi Chitose	: 75 unit
aa. Meja rapat	: 51 unit
bb. Kursi rapat rumdin	: 25 unit
cc. Sofa	: 17 unit
dd. Ac Rumdin	: 6 unit
ee. AC kantor setwan	: 12 unit
ff. PC unit	: 6 unit
gg. Laptop	: 10 unit
hh. Scanner	: 3 unit
ii. Printer	: 10 unit
jj. Mesin pemotong rumput	: 5 unit
kk. Loud speaker	: 5 unit
ll. Soundsystem	: 5 unit
mm. Microphone	: 4 unit
nn. Mic Conference	: 33 unit
oo. Aquarium	: 1 unit
pp. Dispenser	: 6 unit
qq. Palu sidang	: 4 unit
rr. Karpet	: 12 unit
ss. Alat Pemadam kebakaran	: 10 unit



tt. Video wall	: 4 unit
uu. Facsimile	: 2 unit
vv. Digital Audio Tape recorder	: 4 unit
ww. Hardisk external	: 4 unit
xx. Printer personal computer	: 15 unit

## 2.1 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sehingga secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan tersebut terbagi dalam Program yang dituangkan menjadi Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu				100	100	100	100	100		100	100	100			100	100	100	
2	Persentase Perda yang ditetapkan				100	100	100	100	100	76,47	100	75	65,71		76,47	100	75	65,71	
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD				100	100	100	100	100		87,5	100	100			87,5	100	100	
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				100	100	100	100	100		100	100	100			100	100	100	
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100	100	100	100	100		77,46	100	100			100	100	100	
6	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				100	100	100	100	100		100	100	100			100	100	100	

---

### **2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dari tabel diatas, secara umum data menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD beberapa kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan. Dalam hal indikator Persentase Perda yang ditetapkan belum memenuhi target dengan realisasi capaian di bawah 100. disebabkan pembahasan Raperda yang belum selesai. Pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah harus melalui berbagai tahap, disamping itu dalam pembahasannya juga dihadapkan dengan dinamika sosial dan politik yang mudah berubah. Sehingga menjadi kendala yang tidak dapat dihindarkan. Adapun Raperda yang belum selesai tersebut akan dilanjutkan proses pembahasannya pada tahun berikutnya.

Kinerja Sekretariat DPRD dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD Kota Pekalongan, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD Kota Pekalongan banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan institusi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 3 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 32 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasnya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di Kota Pekalongan dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.

---

### **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Setiap tahunnya Perangkat Daerah lainnya menyusun dokumen Rancangan Awal Renja yang dijadikan acuan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Setelah Rancangan Awal Renja disempurnakan maka tahap selanjutnya yaitu penyusunan Rancangan Renja. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Pekalongan. Dari rancangan awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga

harus memperhatikan dokumen Renstra Sekretariat DPRD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2026 yang tercantum dalam dokumen rancangan awal Renja tidak ada perbedaan dengan analisis kebutuhan dengan yang tercantum pada rancangan RKPD. Review program /kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 terhadap rancangan awal RKPD 2026 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026  
Kota Pekalongan**

**OPD : Sekretariat DPRD Kota Pekalongan**

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					<b>SEKRETARIAT DPRD</b>					
					58.805.254.000						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Presentasi keselarasan perencanaan , kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen	29.910.264.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Presentasi keselarasan perencanaan , kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen				Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen				Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
			Presentasi ketersediaan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen				Presentasi ketersediaan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen		
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		Presentasi ketercapaian perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	16.500.000	Perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah		Presentasi ketercapaian perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	20.356.000	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	7.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3.308.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
								Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -SKPD	2 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA -SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -SKPD		1.558.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	8.000.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		15.490.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.399.971.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Presentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		3.199.533.000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 rang/ bulan	3.328.071.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		3.097.833,000	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	70.400.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		100.200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.500.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	9.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 paket	9.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		5.000.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.710.411.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.805.484.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	25.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		19.131.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	255.000.000,0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		173.226.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13.200.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	627.911.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		702.659.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	142.500.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		33.027.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	35.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		25.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	1.300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.544.781.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	300.000.000,00	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		293.650.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	940.937.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.475.721.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	426.150.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	739.137.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.047.771.000	
10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.431.640.000,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.060.434.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	911.640.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	541.091.000	



REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 unit	120.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 unit	117.510.000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya di pelihara / direhabilitasi	2 unit	400.000.000,00	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya di pelihara / direhabilitasi	2 unit	401.833.000	
11	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Presentase ketercapaian layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 persen	20.401.305.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Presentase ketercapaian layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 persen	27.160.805.000	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak keuangan DPRD	35 orang/bulan	19.471.305.000,00	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD		Jumlah anggota DPRD yang menerima Hak keuangan DPRD	35 orang/bulan	26.185.543.000	
	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD yang di sediakan		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang di sediakan	140 paket	400.000.000,00	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD yang di sediakan		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang di sediakan	140 paket	348.790.000	
	Pelaksanaan medical check up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 orang	530.000.000,00	Pelaksanaan medical check up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 orang	590.472.000	
12	Layanan administrasi DPRD		Presentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	1.000.000.000,00	Layanan administrasi DPRD		Presentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	1.208.210.000	
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan	400.000.000,00	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD		Jumlah laporan hasil Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan	488.210.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kota Pekalongan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD	12 paket	600.000.000,00	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Kota Pekalongan	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD		720.000.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Presentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen	28.894.990.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Presentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu			
			Presentase perda yang disetujui	100 persen				Presentase perda yang disetujui			
13	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Presentase Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 persen		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Presentase Pembahasan Kebijakan Anggaran		108.308.000	
	Pembahasan KUA PPAS		Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA PPAS	2 dokumen	150.000.000,00	Pembahasan KUA PPAS		Jumlah dokumen hasil Pembahasan KUA PPAS		47.944.000	
	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	150.000.000,00	Pembahasan APBD		Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD		47.944.000	
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		Jumlah dokumen hasil Pembahasan pertanggung jawaban APBD	1 dokumen	109.197.000,00	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD		Jumlah dokumen hasil Pembahasan pertanggung jawaban APBD		12.420.000	
14	Peningkatan kpasitas DPRD		Presentase keterccapaian peningkatan kapasitas DPRD	100 persen	3.165.557.000,00	Peningkatan kpasitas DPRD		Presentase keterccapaian peningkatan kapasitas DPRD		3.369.176.000	
	Pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil Pendalaman tugas DPRD	4 dokumen	2.000.000.000,00	Pendalaman tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil Pendalaman tugas DPRD		2.157.900.000	

REKAP RANCANGAN AWAL RKPD 2026						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET	PAGU 2026	CATATAN PENTING
	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan hubungan masyarakat	20 dokumen	300.000.000,00	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan hubungan masyarakat	20 dokumen	142.350.000	
	Penyusunan program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	65.000.000,00	Penyusunan program kerja DPRD		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen	140.107.000	
	Publikasi dan dokumentasi DPRD		Jumlah Publikasi dan dokumentasi DPRD	9 Dokumen	800.557.000,00	Publikasi dan dokumentasi DPRD		Jumlah Publikasi dan dokumentasi DPRD	9 Dokumen	982.819.000	
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat		Presentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 persen	1.700.000.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat		Presentase ketercapaian penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 persen	1.569.718.000	
	Kunjungan kerja dalam daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	4 laporan	300.000.000,00	Kunjungan kerja dalam daerah		Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	4 laporan	127.498.000	
	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1.400.000.000,00	Pelaksanaan Reses		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses	3 dokumen	1.442.220,000	
16	Fasilitasi Tugas DPRD		Presentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	100 persen	15.320.236.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD		Presentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD	100 persen	15.027.599.000	
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4 dokumen	15.320.236.000,00	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	4 dokumen	15.027.599.000	
17	Pembentukan peraturan daerah dna peraturan DPRD		Presentase ketercapaian Pembentukan peraturan daerah dna peraturan DPRD	100 persen	8.300.000.000,00	Pembentukan peraturan daerah dna peraturan DPRD		Presentase ketercapaian Pembentukan peraturan daerah dna peraturan DPRD	100 persen	6.829.788.000	

	Pembahasan Raperda	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen pembahasan pembahasan Ranperda	12 dokumen	3.000.000.000,00	Pembahasan Raperda	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen pembahasan pembahasan Ranperda	12 dokumen	3.451.456.000	
	Penyelenggaraan kajian perundang undangan		Jumlah dokumen kajian perundang undangan	11 dokumen	5.300.000.000,00	Penyelenggaraan kajian perundang undangan		Jumlah dokumen kajian perundang undangan	11 dokumen	3.378.332.000	

---

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi dan pelayanan di Sekretariat DPRD hamper tidak ada. Namun usulan dari masyarakat biasanya berupa masukan pada saat Reses yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Kemudian Sekretariat akan merangkum usulan usulan tersebut untuk kemudian akan dibacakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD pada saat Paripurna hasil reses dan setelah itu hasil usulan akan di ubah menjadi pokok pikiran DPRD dan akan disampaikan kepada Bapperida Kota Pekalongan. Sehingga di dalam dokumen perencanaannya di tahun 2026 Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat

**Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

Sumber : SEKRETARIAT DPRD Kota Pekalongan, 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

---

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan maka Prioritas Nasional 2026 yang berkaitan langsung adalah :

- Peningkatan kualitas produk hukum daerah:

Sekretariat DPRD berperan dalam memfasilitasi penyusunan dan pembahasan Raperda.

- Peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD:

Dukungan administrasi dan teknis yang kuat akan meningkatkan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

- Optimalisasi pengelolaan keuangan:

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel akan mendukung kelancaran operasional DPRD dan kegiatan lainnya.

- Peningkatan profesionalisme aparatur:

Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara efektif, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan diharapkan dapat berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, termasuk Prioritas Nasional 2026.

---

#### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat DPRD untuk mendukung prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan).

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2025-2029.

Setiap Perangkat Daerah bersama-sama melakukan optimalisasi untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Wali kota Pekalongan Periode Tahun 2025-2029, oleh karena itu Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mengadopsi Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Wali kota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

Visi Wali kota dan Wakil Wali kota Pekalongan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Kota Pekalongan Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Akhlaqul Karimah” .

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan Sembilan misi pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan 2025-2029, sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat dengan mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Kolaboratif, dan Sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan di semua jenjang secara merata.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat.
4. Membangun Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
5. Peningkatan Layanan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Membangun Kemandirian Ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
7. Melestarikan dan Mengembangkan Budaya Lokal.
8. Meningkatkan Keamanan dan Kondusifitas Wilayah.
9. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan

Berkaitan dengan visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 tersebut maka Sekretariat DPRD sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menjadi unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD juga selaras dengan misi Kota Pekalongan dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, maka Sekretariat DPRD menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD di bidang Legislasi, bidang Penganggaran dan Pengawasan yang kemudian diterapkan pada program kerja dengan indikator :

1. Pembahasan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu;
2. Peraturan Daerah yang disetujui.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, antara lain :

a. Faktor Pendorong :

1. Tersedianya anggaran operasional yang mampu memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2. Adanya Tata Tertib DPRD sebagai dasar hukum bagi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi;
3. Kepemimpinan Partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menciptakan penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas KKN;



4. Kemandirian dalam pelayanan terhadap DPRD dan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, dan staff secretariat yang kompeten.

b. Faktor Penghambat :

1. SDM yang kurang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi menjadi penghambat dalam pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Koordinasi yang kurang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara Eksekutif dan Legislatif, sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Dinamika Politik;
4. Minimnya sarana dan prasarana Gedung kantor Sekretariat DPRD;
5. Tuntutan terhadap profesionalisme ASN Sekretariat DPRD dalam mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas DPRD;

---

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Sehingga ditentukan indikator kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SEKRETARIAT DPRD  
Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027**

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<b>Sekretariat DPRD Kota Pekalongan</b>				<b>63.858.172.000</b>				<b>58.805.254.000</b>
	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	<b>36.899.533.000</b>	APBD Kota Pekalongan			<b>29.910.264.000,</b>
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Kota Pekalongan	100 persen	20.356.000	APBD Kota Pekalongan		2 Dokumen	16.500.000
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Pekalongan	2 dokumen	3.308.000,00	APBD Kota Pekalongan		3 Dokumen	7.000.000
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.558.000,00	APBD Kota Pekalongan		2 dokumen	1.500.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kota Pekalongan	15 Laporan	15.490.000	APBD Kota Pekalongan		15 Laporan	8.000.000,00
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Kota Pekalongan	100 persen	3.199.533.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 persen	3.399.971.000
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Pekalongan	25 Orang/bulan	3.097.833.000	APBD Kota Pekalongan		25 Orang/bulan	3.328.071.00
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Kota Pekalongan	12 Dokumen	100.200.000	APBD Kota Pekalongan		12 Dokumen	70.400.000
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kota Pekalongan	1 Laporan	1.500.000,00	APBD Kota Pekalongan		1 Laporan	1.500.000,00
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kota Pekalongan	100 Persen	5.000.000,	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	9.500.000
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	APBD Kota Pekalongan		2 Paket	9.500.000
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	2.805.474.000	APBD Kota Pekalongan		100 persen	2.710.411.000
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	4 Paket	19.131.000	APBD Kota Pekalongan		4 paket	25.000.000

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	4 Paket	173.226.000	APBD Kota Pekalongan		5 Paket	255.000.000
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	4 Paket	13.200.000,	APBD Kota Pekalongan		4 Paket	25.000.000
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	4 Paket	702.659.000	APBD Kota Pekalongan		4 Paket	627.911.000
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	2 Paket	33.027.000	APBD Kota Pekalongan		4 paket	142.500.000
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	2 Dokumen	25.800.000	APBD Kota Pekalongan		2 Dokumen	35.000.000
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	293.650.000	APBD Kota Pekalongan		12 Laporan	300.000.000
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	1.544.781.000,00	APBD Kota Pekalongan		12 Laporan	1.300.000.000,
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	1.475.721.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	940.937.000,00
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Pekalongan	4 Laporan	1.800.000,00	APBD Kota Pekalongan		4 Laporan	1.800.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	426.150.000,00			12 Laporan	200.000.000,00
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	1.047.771.000,00			12 Laporan	739.137.000,00
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	1.060.434.000,00			100 persen	1.431.640.000,00
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Pekalongan	23 Unit	541.091.000,00			23 Unit	911.640.000,00
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Pekalongan	2 Unit	401.833.000,00			2 Unit	400.000.000,00
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Pekalongan	143 Unit	117.510.000			143 Unit	120.000.000,00
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	<i>Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	27.124.805.000,00			100 persen	20.401.305.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	<i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>	Kota Pekalongan	35 Orang/Bulan	26.185.543.000,00	APBD Kota Pekalongan		35 Orang/Bulan	19.471.305.000,00
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	140 Paket	348.790.000,00	APBD Kota Pekalongan		140 Paket	400.000.000,00
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i>	Kota Pekalongan	35 Orang	590.472.000,00	APBD Kota Pekalongan		35 Orang	530.000.000,00
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	<i>Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	1.208.210.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	1.000.000.000,00
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	488.210.000,00	APBD Kota Pekalongan		12 Laporan	400.000.000,00
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan</i>	Kota Pekalongan	12 Paket	720.000.000,00	APBD Kota Pekalongan		12 Paket	600.000.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase Perda yang disetujui</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	26.958.639.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 Persen	28.894.990.000,00
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<i>Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD</i>	Kota Pekalongan	100 persen	6.829.788.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 persen	8.300.000.000,00
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</i>	Kota Pekalongan	12 Dokumen	3.451.456.000,00	APBD Kota Pekalongan		12 Dokumen	3.000.000.000,00
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan</i>	Kota Pekalongan	12 Dokumen	3.378.332.000,00	APBD Kota Pekalongan		11 Dokumen	5.300.000.000,00
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	<i>persentase pembahasan kebijakan anggaran</i>	Kota Pekalongan	100 persen	108.358.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 persen	409.197.000,00

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS</i>	Kota Pekalongan	2 Dokumen	47.944.000,00	APBD Kota Pekalongan		2 Dokumen	150.000.000,00
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD</i>	Kota Pekalongan	2 Dokumen	47.994.000,00	APBD Kota Pekalongan		2 Dokumen	150.000.000,00
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	Kota Pekalongan	1 Dokumen	12.420.000,00	APBD Kota Pekalongan		1 Dokumen	109.197.000,00
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	<i>Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	3.423.176.000,00	APBD Kota Pekalongan		100,00 persen	3.165.557.000,00
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	Kota Pekalongan	6 Dokumen	2.157.900.000,00	APBD Kota Pekalongan		4 Dokumen	2.000.000.000,00
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	Kota Pekalongan	10 Dokumen	142.350.000,00	APBD Kota Pekalongan		20 Dokumen	300.000.000,00
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	Kota Pekalongan	1 Dokumen	140.107.000,00	APBD Kota Pekalongan		1 Dokumen	65.000.000,00



NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2026				Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU PERKIRAAN TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET	PAGU 2026	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	<i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	Kota Pekalongan	18 Dokumen	982.819.000,00	APBD Kota Pekalongan		9 Dokumen	800.557.000,00
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	<i>Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	Kota Pekalongan	100 Persen	1.569.718.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 persen	1.700.000.000,00
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD</i>	Kota Pekalongan	12 Laporan	127.498.000,00	APBD Kota Pekalongan		4 Laporan	300.000.000,00
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	Kota Pekalongan	3 Dokumen	1.442.220.000,00	APBD Kota Pekalongan		3 Dokumen	1.400.000.000,00
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	<i>Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD</i>	Kota Pekalongan	3 Dokumen	1.442.220.000,00	APBD Kota Pekalongan		100 persen	15.320.236.000,00
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	Kota Pekalongan	12 Dokumen	15.027.599.000,00	APBD Kota Pekalongan		4 Dokumen	15.320.236.000,00

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026. Rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029, mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang sudah ada dalam SIPD, sehingga ketercapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan SEKRETARIAT DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026**

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>63.858.172.000</b>		
<b>I</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keselarasan perencanaan, kinerja evaluasi dan kinerja keuangan perangkat daerah	100 persen
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
			Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
<b>1</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.308.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.558.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.490.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan

<b>2</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.833.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.200.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
<b>3</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen
7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket
<b>4</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.131.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.226.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.200.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	702.659.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.027.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.800.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.544.781.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan
15	Fasilitasi kunjungan Tamu	293.650.000	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
<b>5</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.150.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.047.771.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome / Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	541.091.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit
19	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	401.833.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara ./ direhabilitasi	2 unit
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.510.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 unit
<b>7</b>	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
21	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.185.543.000	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan	35 orang
22	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	590.472.000	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	35 orang
23	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	348.790.000	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4 paket
<b>8</b>	Layanan Administrasi DPRD			
24	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	488.210.000	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan
25	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	720.000.000	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	12 paket
<b>II</b>	Program dukungan dan Pelaksanaan Fungsi DPRD			
<b>9</b>	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD			
26	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	3.451.456.000	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan Perda	9 dokumen
27	Penyelenggaraan Kajian perundang undangan	3.378.332.000	Jumlah dokumen kajian perundang undangan	8 dokumen

<b>10</b>	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
28	Pembahasan KUA dan PPAS	47.944.000	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA PPAS	2 dokumen
29	Pembahasan APBD	47.994.000	Jumlah dokumen hasil pembahsan APBD	2 dokumen
30	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	12.420.000	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen
<b>11</b>	Peningkatan Kapasitas DPRD			
31	Pendalaman tugas DPRD	2.157.900.000	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	4 dokumen
32	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	142.350.000	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	20 dokumen
<b>33</b>	Penyusunan Program Kerja DPRD	140.107.000	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 dokumen
<b>34</b>	Publikasi dan Dokumentasi	982.819.000	Jumlah dokumen publikasi dan dokumentasi DPRD	12 dokumen
<b>12</b>	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat			
35	Kunjungan kerja dalam daerah	127.498.000	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	40 laporan
36	Pelaksanaan reses	1.442.220.000	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	5
37	Fasilitasi tugas DPRD	15.027.599.000	Jumlah hasil fasilitasi tugas DPRD	12 laporan

Dari tabel 4.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2026 SEKRETARIAT DPRD Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh ) sub kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

Sebuah perencanaan dapat dikatakan baik apabila memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Artinya bahwa perencanaan secara konsisten dijalankan oleh para perencananya. Hal ini akan diwujudkan dengan peningkatan persentase keterserapan program dan kegiatan antar dokumen rencana. Oleh karenanya Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagai OPD terus berupaya menyusun dokumen perencanaan secara baik.

Untuk mendukung sasaran tersebut di tahun mendatang, Sekretariat DPRD Kota Pekalongan menuangkan perencanaan tahunan ke dalam dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan memuat rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 yang tetap memprioritaskan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Pekalongan serta berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja pengawasan dengan didukung penyediaan SDM aparatur yang profesional dan kredibel serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Selain itu Renja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan ini disusun untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagaimana yang tertuang dalam rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai yang substansinya telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Pekalongan sehingga terciptanya perencanaan yang sinergi dan selaras pada masing-masing OPD umumnya serta pada Sekretariat DPRD khususnya.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2026 disusun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai tujuan, sasaran serta target yang ditetapkan.

Pekalongan, 20 Juli 2025  
Sekretaris DPRD Kota Pekalongan



**WIDARJANTO, S.H.M.Hum**

